

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Sebagai salah satu daerah otonom baru tentunya masih terdapat permasalahan daerah diantaranya menyangkut aset/barang milik daerah. Daerah juga memiliki peran dalam mengelola aset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin dalam kinerja pemerintah daerah, dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang optimal, hal ini terjadi di semua bidang baik sektor swasta maupun pemerintah. Didukung dengan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat menunjukkan sistem dan prosedur tersebut secara optimal.

Setiap organisasi termasuk juga organisasi pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi pemerintahan memerlukan sistem dan prosedur untuk dapat memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan

organisasi dapat dicapai. Untuk mencapai strategi pemerintah diperlukan pemerintahan yang jujur. Dimana pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola berbagai kewenangan dalam mengelola negara/pemerintah memerlukan adanya kesiapan diberbagai aspek dalam aspek penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan terutama kesiapan dalam ketersediaan berbagai penunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dalam rangka otonomi daerah, seiring perkembangan sebuah organisasi lembaga atau instansi yang ada pada saat ini, maka semakin bertambah pula jumlah aset yang dibutuhkan oleh organisasi, instansi atau lembaga tersebut. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Penyediaan sarana kerja yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan manfaat dengan tetap perpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, sarana kerja harus dapat dikelola dengan benar agar mampu menunjang pelaksanaan tugas para pegawai secara maksimal. Epi Amelia, (2015: 17).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih. Kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah. Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan evaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara. Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa

Pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Pengelolaan aset/barang milik daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset/barang milik daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

menciptakan nilai tambah dalam mengelola barang milik daerah tersebut. Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditangani secara baik dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun pada kenyataannya penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan sesuai yang diharapkan, karena mempunyai beberapa permasalahan diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Permasalahan Aset Daerah

No	Permasalahan	Keterangan
1.	Masih terdapat asset tetap yang belum memiliki nilai	Belum dilakukan proses penilaian atas asset tetap yang belum memiliki nilai
2.	Belum adanya inventarisasi asset yang akan dihapuskan	Banyak asset tetap yang perlu dihapuskan, karena kondisinya yang rusak berat
3.	Belum memadainya tempat atau gudang penyimpanan baik itu persediaan maupun asset tetap.	Memiliki potensi asset tersebut disalahgunakan.

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejauh ini juga belum mengoptimalkan potensi daerah melalui aset/barang milik daerah. Terkait hal tersebut, maka perlu langkah-langkah di dalam pengelolaan aset/barang milik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti secara tepat dan memadai, tidak hanya menciptakan pengelolaan aset yang baik tetapi juga berfikir untuk memanfaatkan potensi aset tersebut guna meningkatkan pendapatan daerah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I.01: 66).

Penelitian yang dibuat oleh Veronika Mulalinda, dan S.J Tangkuman (2014) dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Veronika Mulalinda, dan S.J Tangkuman (2014) dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada objek penelitian, judul yang saya angkat yaitu Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian analisis studi kasus mengenai Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkhususnya penelitian ini menjadikan dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai objeknya dikarenakan permasalahan yang ada saat ini. Penelitian ini berjudul: **Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apakah efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
3. Apakah hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, pengalaman lebih dalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi yang sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bekal didunia kerja nantinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *literature* dan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian masa yang akan datang.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan evaluasi untuk kinerja manajerial yang lebih baik lagi demi kemajuan organisasi pemerintahan kedepannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian yang berisikan mengenai sejarah berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti, visi, dan misi BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang disiapkan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini